JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi
Vol. 7, No. 4, Desember 2025
p-ISSN : 2745-9489, e-2746-3842
DOI: *10.36312/jime.vxix.xxxx/ https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIHAD/issue/archive*

SISTEM E-PLANNING DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO

Adelia Mayanggita[1], Apris Ara Tilome[2], Frangky Djafar[3], Dian Fitriani Karim[4]
[1,2,3,4]Universitas Muhammadiyah Gorontalo

Article Info

Article history:

Accepted: 11, December, 2025

Publish: , December, 2025

Keywords:

Planning

TOE Framework

Bappeda

Technology

ABSTRACT

Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem e-Planning belum berjalan secara optimal dan masih menghadapi berbagai hambatan dalam tiga aspek utama. Dari aspek teknologi, gangguan jaringan internet yang tidak stabil menjadi kendala dominan yang menyebabkan keterlambatan hingga kegagalan akses sistem. Pada aspek organisasi, SOP yang tersedia masih bersifat umum dan belum disesuaikan dengan kebutuhan teknis masing-masing bidang, sehingga menimbulkan ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan tugas. Sementara itu, dari sisi lingkungan, rendahnya pemahaman dan keterampilan teknis sumber daya manusia, serta belum meratanya pelatihan, menjadi tantangan dalam optimalisasi penggunaan sistem. Penelitian ini merekomendasikan perbaikan infrastruktur jaringan, penyusunan ulang SOP yang lebih kontekstual, serta pelatihan teknis yang berkelanjutan guna meningkatkan efektivitas penerapan e-Planning di lingkungan Bappeda Kabupaten Gorontalo.

Article Info

Article history:

Diterima: 11, Desember, 2025

Terbit: , Desember, 2025

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the e-Planning system in the Regional Development Planning Agency ancy (Bappeda) of Gorontalo Regency using the Technology-Organization-Environment (TOE) approach. The method used is a qualitative approach with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results of the study indicate that the implementation of the e-Planning system has not been running optimally and still faces various obstacles in three main aspects. From the technological aspect, unstable internet network interference is a dominant obstacle that causes delays and failures in system access. From the organizational aspect, the available SOPs are still general and have not been adapted to the technical needs of each sector, resulting in inconsistencies in task implementation Meanwhile, from the environmental side, the low understanding and technical skills of human resources. as well as unequal training, are challenges in optimizing system use. This study recommends improving network infrastructure, re-drafting more contextual SOPs and ongoing technical training to increase the effectiveness of e-Planning implementation in the Bappeda of Gorontalo Regency.

This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional

Corresponding Author:

Adelia Mayanggita,

Universitas Muhammadiyah Gorontalo

Email: adeliamayanggita@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan wilayah adalah usaha yang terstruktur untuk mengarahkan pengembangan yang efisien, efektif, dan berkelanjutan. Dalam rangka mendukung tujuan ini, pemerintah Indonesia telah memulai berbagai reformasi, salah satunya adalah dengan mengadopsi teknologi informasi dalam sistem perencanaan pembangunan yang disebut e-Planning. E-Planning adalah sebuah inovasi yang berbasis teknologi dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Dalam zaman globalisasi sekarang, perekembangan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi membutuhkan penyesuaian yang berkelanjutan untuk melakukan perubahan dan perbaikan di berbagai sektor.situasi ini menciptakan peluang besar bagi indonesia secara keseluruham,serta bagi instansi pe,erintah atau OPD secara spesifik,untuk mengadopsi dan memanfaatkan teknologi informasi serta internet dalam struktur pemerintahan.dengan demikian, untuk mencapai penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang efisien dan efektif,sangat penting untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi melalui pengaturan sistem manajemen dan proses kerja dalam lingkungan pemerintahan yang berbasis elektronik.

Teknologi memiliki peran signifikan sebagai instrumen paling penting dalam memperbaiki mutu pelayanan yang bersih,transparan,efisien,dan efeltif demi mencapai suatu tata kelola pemerintahan yang baik.ini adlah harapan bagi setiap warga untuk menerima pelayanan yang memuaskan dari pihak pemerintah.saat ini,pemerintah harus menyesuaikan diri dengan kemajuab teknologi agar tidak ketinggalan dan dapat memenuhi tuntutan masyarakat yang kian beragam.

Perkembangan teknologi saat ini mendukung BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) untuk berinovasi dengan menciptakan sistem informasi terpadu dalam perencanaan dan pembangunan daerah yang sejalan dengan tujuan pembangunan nasional. Salah satu inovasi dari sistem ini adalah aplikasi E-Planning, yang mempermudah proses perencanaan pembangunan di semua level secara administratif. E-Planning kini menjadi salah satu bentuk penerapan e-government, namun lebih fokus pada penggunaan teknologi elektronik dalam bidang perencanaan dan pembangunan. Ini adalah langkah logis dalam mengembangkan sistem informasi untuk perencanaan pembangunan daerah.

Sistem e-Planning adalah suatu platform informasi yang menggabungkan berbagai proses perencanaan pembangunan daerah ke dalam bentuk digital yang saling terhubung. Penerapan sistem ini selaras dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yang mengatur tentang Tahapan, Prosedur Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.Sistem e-Planning adalah suatu platform informasi yang menggabungkan berbagai proses perencanaan pembangunan daerah ke dalam bentuk digital yang saling terhubung. Penerapan sistem ini selaras dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2008 yang mengatur tentang Langkah-Langkah, Proses Penyusunan, Pengawasan, serta Penilaian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Salah satu daerah yang telah mengadopsi e-Planning dalam kegiatan perencanaannya adalah Kabupaten Gorontalo. Sebagai sebuah daerah otonom di Provinsi Gorontalo, kabupaten ini telah menerapkan sistem e-Planning dalam upaya perencanaan pembangunan. Langkah ini merupakan

bagian dari usaha pemerintah daerah untuk memperbarui sistem perencanaan pembangunan dan meningkatkan mutu perencanaan pembangunan di wilayah tersebut.

Undang-Undang (UU) serta peraturan yang berkaitan dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) mencakup UU No. 25 Tahun 2004 yang mengatur tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, meliputi perencanaan, pengelolaan, dan monitoring pembangunan, serta UU No. 1 Tahun 2022 yang mengatur tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang berisi tentang manajemen keuangan ditingkat daerah dan alokasi dana antara pemerintah pusat dan daerah. Berdasarkan Permendagri No. 70 Tahun 2019 yang mengatur Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), peraturan ini mengelola data dan informasi terkait pemerintahan daerah, sedangkan Permendagri No. 98 Tahun 2018 yang mengatur Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), berfokus pada pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah. Namun, peraturan tersebut telah dicabut oleh Permendagri No. 70 Tahun 2019.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Gorontalo, sebagai sektor terdepan dalam perencanaan pembangunan daerah, memainkan peran penting dalam mengimplementasikan sistem e-Planning. Keberhasilan penerapan sistem ini sangat tergantung pada kemampuan BAPPEDA dalam mengelola dan mengoptimalkan penggunaannya. Dengan adanya aplikasi e-Planning dalam proses perencanaan, diharapkan dapat mempermudah tugas para perencana, mengingat bahwa proses perencanaan memerlukan waktu yang lama dan ketelitian tinggi dalam penyusunannya. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan observasi awal, implementasi sistem e-Planning di Kabupaten Gorontalo sudah berjalan beberapa tahun ini namun masih banyak permasalahan. Salah satunya adalah kesiapan sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem. Tidak semua aparatur memiliki pemahaman dan keterampilan dalam Penggunaan teknologi informasi, terutama dalam aspek e-planning, akan memengaruhi cara penyusunan dokumen perencanaan untuk pembangunan daerah. Secara otomatis, hal ini akan menghadirkan tantangan serius dalam sektor perencanaan pembangunan. Di sisi lain, masalah muncul karena para aparatur mengalami kesulitan dalam menyusun dokumen rencana akibat keterbatasan pengetahuan mengenai standar operasional prosedur perencanaan yang berlaku, serta adanya gangguan pada koneksi internet yang tidak stabil. Hal ini berdampak pada pelaksanaan program e-planning, sehingga para aparatur kesulitan untuk menganalisis capaian kinerja, baik antar waktu, antar wilayah, maupun dalam hal kecocokan dengan sasaran program dan kegiatan yang diharapkan sesuai dengan visi dan misi organisasi. Situasi ini berpotensi memengaruhi kualitas data dan informasi yang dihasilkan.

Aspek regulasi dan kebijakan juga memainkan peran penting dalam implementasi e-Planning. Keberlanjutan sistem e-Planning juga perlu mendapat perhatian khusus. Sistem ini perlu terus dikembangkan dan disempurnakan sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan organisasi. Sistem pemeliharaan dan pengembangan kapasitas SDM perlu dilakukan secara berkelanjutan.

Penelitian ini juga berkaitan dengan permintaan untuk meningkatkan mutu layanan publik serta pengelolaan pemerintahan yang baik. Penerapan e-Planning merupakan salah satu inovasi yang dapat membantu mencapai sasaran tersebut dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses perencanaan pembangunan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis sejauh mana penerapan sistem e-Planning mendukung proses perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Gorontalo.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan fokus kualitatif. Menurut Narbuko dan Achmadi (2014:44), penelitian deskriptif adalah tipe studi yang

berupaya untuk menggambarkan situasi yang ada saat ini berdasarkan data yang tersedia, sehingga mencakup penyajian data, analisis, dan interpretasi; dan dapat juga bersifat komparatif serta korelatif.

Tipe penelitian yang terdapat dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Sugiono (2015:26) dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RandD menyatakan bahwa tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk mengungkap informasi kualitatif sehingga lebih menekankan pada olahan proses dan arti dengan memberikan deskripsi tentang suatu masalah. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu untuk memahami atau menggambarkan keadaan dari peristiwa yang diteliti atau analisis yang dilakukan terhadap satu variabel saja, tanpa melakukan perbandingan atau mengaitkan dengan variabel lainnya. Lokasi penelitian ini berada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gorontalo.

Penelitianyangakandilaksanakan memakai 2 (dua) jenis sumber data, yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber informasi utama yang berasal dari ucapan dan perilaku individu yang sedang diamati atau diwawancarai. Informasi ini dikumpulkan secara langsung dari narasumber setelah mereka memberikan penjelasan, reaksi, dan jawaban terhadap berbagai pertanyaan yang disampaikan oleh peneliti..

- Kepala Sub Bagian Kepegawaian **:**1 orang
- Sub Koordinator perencana :1 orang
- Kepala Bidang Penelitian :1orang
- Staf Koordinator Bidang Perencanaan :1orang
- Staf Bagian IT :1 orang
- Staf Kepegawaian :1orang
- Komisi III DPRD :1orang

2. Data Sekunder

Data yang di peroleh yang bersumber dari instansi, perpustakaan ataupun buku yang berkaitan dengan penelitian.

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif yang menjelaskan objek penelitian secara lisan melalui data yang telah diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada informan. Proses pengumpulan data dilakukan secara langsung di lapangan, di mana peneliti mendatangi lokasi untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Metode yang dipakai untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah: Observasi, Wawancara dan Telaah dokumen.

Tahapan analisis data dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu reduksi data, presentasi data, dan kesimpulan/verifikasi.

Dalam pengecekan keabsahan data, peneliti mengunakan teknik sebagai berikut:

1. Ketekunan Pengamatan

Pada teknik ini dilakukan pencarian keadaan,cirri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Triangulasi

Pada teknik ini peneliti memanfaatkan sumber dan metode sebagai pendukung dalam pemeriksaan. Pada teknik ini dilakukan pengalian data yang sama dari berbagai sumber untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding utama terhadap data tersebut.(Sugiyono, 2015:277).

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1.Hasil Penelitian

1. Konteks Teknologi (*Technological Context*)

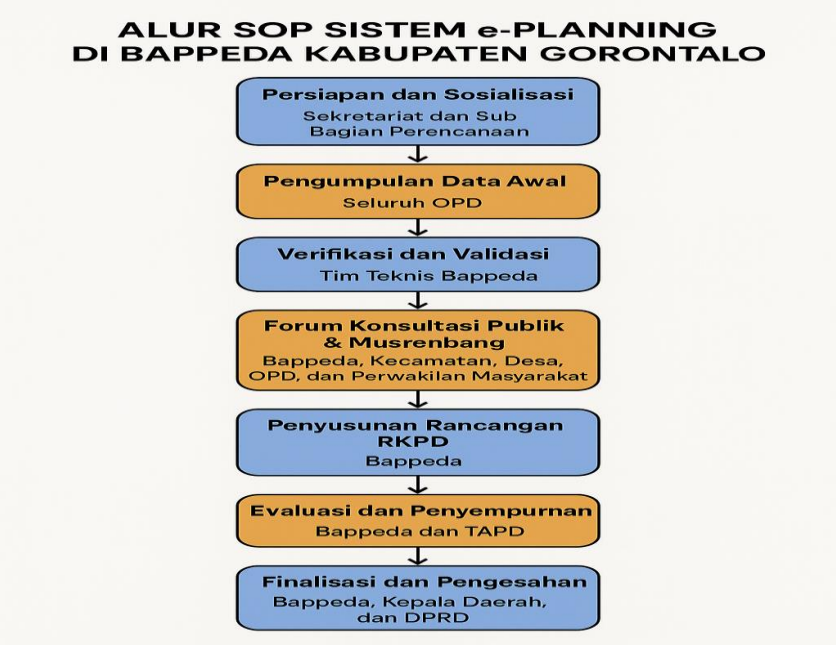
Dalam konteks TOE Framework, aspek teknologi menjadi elemen utama yang mempengaruhi keberhasilan adopsi sistem informasi. Gangguan jaringan internet menjadi keluhan dominan yang disampaikan.

Faktor teknologi, khususnya infrastruktur jaringan internet, menjadi penghalang utama dalam implementasi sistem e-Planning di Bappeda Kabupaten Gorontalo. Masalah jaringan yang kerap terjadi, terutama saat jam sibuk dan mendekati tenggang waktu pengisian data, mengakibatkan keterlambatan dalam pekerjaan, kehilangan data, dan penurunan efisiensi operasional. Hal ini menunjukkan bahwa kesiapan teknologi—seperti yang diungkapkan dalam kerangka TOE—belum sepenuhnya tercapai. Selain itu, diperlukan dukungan dari organisasi dalam bentuk kebijakan strategis seperti pengalokasian anggaran khusus, peningkatan kapasitas jaringan, kerja sama antar instansi dengan Dinas Kominfo, serta audit infrastruktur dan penyusunan prosedur operasional standar untuk menangani gangguan. Semua langkah ini mencerminkan pentingnya kolaborasi antara aspek teknologi dan organisasi agar sistem e-Planning dapat berfungsi dengan baik dan mendukung perencanaan pembangunan secara efektif dan transparan.

2. Konteks Organisasi (*Organizational Context*)

Konteks organisasi dalam TOE Framework mencakup aspek internal organisasi yang berpengaruh terhadap adopsi dan implementasi teknologi, seperti struktur organisasi, sumber daya manusia, proses formal (termasuk SOP), serta dukungan manajerial. Dalam konteks penelitian ini, terdapat dua permasalahan utama yang berkaitan dengan dimensi organisasi, yaitu: **(1) belum kuatnya Standard Operating Procedure (SOP)** dalam pelaksanaan e-planning, dan **(2) kurangnya pemahaman serta keterampilan aparatur** dalam penggunaan sistem e-planning.

Untuk memahami proses pelaksanaan sistem e-Planning secara menyeluruh, berikut ini disajikan alur Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diterapkan oleh Bappeda Kabupaten Gorontalo. Alur ini menggambarkan tahapan-tahapan mulai dari persiapan hingga finalisasi dokumen perencanaan daerah melalui sistem e-Planning:



Gambar 1. Alur SOP Sistem E-Planning BAPPEDA

Dokumen Standard Operating Procedure (SOP) yang saat ini digunakan dalam pelaksanaan sistem **e**-Planning belum sepenuhnya **memenuhi** kebutuhan operasional yang nyata di lingkungan kerja**.** SOP yang tersedia bersifat umum dan cenderung tidak kontekstual, sehingga tidak mampu memberikan panduan teknis yang memadai bagi pegawai dari berbagai unit kerja.Dari wawancara yang dilakukan, seorang informan menyampaikan bahwa tidak adanya penyesuaian SOP dengan struktur kerja di masing-masing bidang menyebabkan perbedaan pemahaman dan penerapan alur

kerja antar unit. Hal ini mengindikasikan bahwa SOP belum dirancang dengan pendekatan fungsional yang mempertimbangkan keragaman peran dan tanggung jawab antar bidang, sehingga muncul ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan tugas, terutama dalam proses input data pada sistem e-Planning.

3. Kontex Lingkungan (*Environmental Contect)*

Memengaruhi keputusan organisasi dalam mengadopsi dan mengimplementasikan teknologi. Faktor-faktor ini dapat berupa regulasi pemerintah, tekanan dari lembaga pengawas, tuntutan masyarakat, perkembangan teknologi secara umum, serta dukungan dari mitra eksternal.Dalam konteks penelitian ini, implementasi sistem e-planning di lingkungan instansi pemerintah tidak terlepas dari adanya dorongan eksternal, terutama dari regulasi nasional yang mewajibkan penerapan sistem perencanaan pembangunan berbasis elektronik sebagai bagian dari kebijakan reformasi birokrasi dan penguatan sistem e-government.

Pelatihan yang ada masih bersifat formalitas, tanpa pendampingan lanjutan. Banyak staf kesulitan karena tidak memahami alur sistem secara utuh. Menurut saya, pelatihan harus lebih praktis, rutin, dan menyentuh pemahaman logika sistem agar pengguna benar-benar siap dalam mengoperasikan e-Planning secara efektif.

3.2.Pembahasan

1. Konteks Teknologi (*Technological Context)*

Gangguan jaringan internet merupakan permasalahan teknologi paling signifikan yang menghambat kelancaran penggunaan sistem e-Planning di Bappeda Kabupaten Gorontalo.

Gangguan akses ke sistem sering terjadi, terutama pada saat jam sibuk atau menjelang batas waktu input data. Hal ini menyebabkan sistem menjadi lambat, halaman tidak terbuka, bahkan data yang sudah diinput bisa hilang jika koneksi terputus. Dalam banyak kasus, permasalahan ini memaksa staf untuk bekerja lembur agar target waktu tetap terpenuhi.ditemukan beberapa faktor teknologi yang menjadi penghambat optimalisasi sistem e-Planning, yaitu:

a) Keterbatasan Infrastruktur Teknologi
   Fasilitas jaringan internet yang belum stabil masih menjadi kendala utama dalam pengoperasian sistem e-Planning. Beberapa informan menyatakan bahwa saat proses input data atau sinkronisasi, sistem sering mengalami kelambatan (lag), bahkan gagal menyimpan data. Hal ini menghambat kelancaran proses perencanaan pembangunan yang seharusnya dilakukan secara digital dan real-time.
b) Belum Optimalnya Integrasi Sistem
   Sistem e-Planning belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem perencanaan lain seperti SIPD atau sistem internal OPD lainnya. Akibatnya, terjadi tumpang tindih data dan input ganda yang menyulitkan pengguna dalam memastikan konsistensi informasi antar platform.
c) Tingkat Keandalan dan Keamanan Sistem
   Sistem belum dilengkapi dengan mekanisme cadangan data (backup) dan pengamanan yang memadai. Beberapa petugas menyampaikan kekhawatiran terkait risiko kehilangan data akibat gangguan teknis, serta belum adanya SOP atau protokol keamanan data yang jelas.

2. Konteks Organisasi (*Organizational Context)*

Salah satu tantangan utama dalam penerapan sistem e-planning adalah tidak adanya prosedur standar operasional (SOP) yang detail,jelas,dan sesuai konteks sebagai pedoman kerja. SOP yang saat ini ada masih dirasa terlalu umum tidak disesuaikan dengan struktur kerja masing-masing bidang,dan tidak memberikan petunjuk teknis yang cukup berkaitan dengan langkah-langkah penggunaan sistem. Akibatnya, terjadi ketidakseragaman dalam proses penginputan data antar unit kerja,serta kebingungan dalam proses penginputan.

Dalam upaya mendorong reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik, pemerintah daerah mulai menerapkan berbagai sistem informasi, salah satunya adalah e-Planning. Namun, keberhasilan implementasi sistem ini tidak hanya ditentukan oleh faktor teknologi semata, melainkan juga oleh kesiapan internal organisasi sebagai pelaksana utama.

Dalam kerangka TOE (Technology-Organization-Environment) yang dikembangkan oleh Tornatzky dan Fleischer (1990), konteks organisasi mencakup elemen-elemen penting seperti dukungan pimpinan, kompetensi sumber daya manusia, struktur kerja, budaya organisasi, dan alokasi sumber daya.

Di Bappeda Kabupaten Gorontalo, implementasi e-Planning masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya berasal dari kelemahan dalam konteks organisasi. Permasalahan seperti belum tersosialisasinya SOP, kurangnya pelatihan teknis, dan rendahnya pemahaman pegawai terhadap alur sistem menunjukkan bahwa organisasi belum sepenuhnya siap secara internal dalam mendukung sistem ini.

Weiner (2009) Teori ini menjelaskan bahwa kesiapan organisasi terhadap perubahan teknologi bergantung pada kesiapan struktural, termasuk adanya aturan kerja yang jelas, seperti SOP. Jika SOP belum memadai, maka organisasi tidak sepenuhnya siap untuk menjalankan sistem digital secara konsisten dan berkelanjutan. SOP adalah bagian dari instrumen yang mencerminkan kesiapan struktural dalam menghadapi transformasi digital.

Pegawai di Bappeda Kabupaten Gorontalo menunjukkan bahwa standar operasional prosedur (SOP) yang berkaitan dengan sistem e-Planning belum sepenuhnya mapan dan berjalan dengan baik. Beberapa responden mengungkapkan bahwa meskipun terdapat panduan teknis,namun masih kurang detail atau kurang disebarluaskan secara efektif.Hal ini mengakibatkan pegawai sering kali bergantung pada pengalaman terdahulu atau inisiatif pribadi dalam menjalankan tugas,yang dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara berbagai unit kerja.

Ketidak sesuaian SOP juga menimbulkan kebingungan dalam penugasan,cara penginputan data, serta tahap-tahap verifikasi dan validasi perencanaan.Situasi ini berpotensi menurunkan efektivitas dan ketepatan data yang masuk dalam sistem e-Planning.SOP yang tidak cukup kuat juga mempengaruhi kelangsungan sistem, karena pegawai baru atau pengguna yang belum terbiasa akan mengalami kesulitan saat mencoba memahami jalur kerja sistem.

3. Kontex Lingkungan (*Environmental Contect)*

Masih terdapat keterbatasan pemahaman dan keterampilan teknis SDM dalam mengoperasikan sistem e-Planning. Beberapa informan menyampaikan bahwa mereka belum sepenuhnya menguasai fitur-fitur dalam sistem, bahkan ada yang masih mengalami kesulitan dalam proses input dan validasi data.

Selain itu, pelatihan yang diberikan dinilai belum merata dan tidak berkelanjutan, sehingga tidak semua pegawai memiliki kemampuan yang setara dalam menggunakan aplikasi. Kondisi ini menyebabkan ketergantungan pada personel tertentu yang dianggap lebih paham teknologi. Ketimpangan kapasitas ini juga berdampak pada efisiensi kerja serta akurasi perencanaan, karena proses penginputan dan pelaporan menjadi tidak optimal.

Masalah kurangnya keterampilan ini menunjukkan bahwa dari aspek organisasi dalam kerangka *Technology-Organization-Environment (TOE)*, faktor kesiapan sumber daya manusia masih menjadi tantangan utama yang harus diatasi untuk mendukung penerapan sistem informasi secara maksimal.

Parasuraman (2000) menjelaskan bahwa Technology Readiness adalah tingkat kesiapan individu untuk menerima dan menggunakan teknologi baru. Dalam konteks ini, kurangnya pelatihan dan pemahaman SDM menunjukkan rendahnya readiness, yang dapat menghambat keberhasilan implementasi sistem digital. Agar sistem dapat dimanfaatkan secara maksimal, organisasi perlu

membangun kesiapan mental dan keterampilan teknis pegawai melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun ada dorongan kuat dari lingkungan eksternal untuk menerapkan sistem e-Planning, hambatan berupa minimnya dukungan teknis, ketidaksesuaian regulasi pusat-daerah, serta resistensi budaya menjadi tantangan yang signifikan dalam konteks lingkungan eksternal Bappeda Kabupaten Gorontalo.

4. KESIMPULAN

Penerapan sistem e-Planning belum berjalan secara optimal dan masih menghadapi hambatan dalam tiga aspek utama, yaitu teknologi, organisasi, dan lingkungan. Dari segi teknologi, gangguan jaringan internet yang tidak stabil menjadi kendala utama yang menyebabkan sistem sering mengalami kelambatan, kesalahan, hingga tidak dapat diakses, terutama saat jam sibuk. Pada aspek organisasi, SOP yang ada masih bersifat umum dan belum disesuaikan dengan kebutuhan teknis masing-masing bidang, sehingga menimbulkan ketidakkonsistenan dalam proses kerja. Sementara itu, dari sisi lingkungan atau sumber daya manusia, keterbatasan pemahaman dan keterampilan teknis aparatur, termasuk pengelola sistem, serta pelatihan yang belum merata, menunjukkan rendahnya kesiapan individu dalam mengoperasikan sistem secara optimal. Dengan demikian, keberhasilan penerapan sistem e-Planning sangat bergantung pada perbaikan infrastruktur teknologi, penguatan struktur organisasi melalui SOP yang kontekstual, serta peningkatan kapasitas SDM secara berkelanjutan**.**

5. UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gorontalo atas dukungan dan informasi yang diberikan selama penelitian ini berlangsung.

6. DAFTAR PUSTAKA

A. Abe, *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Solo: Pondok Edukatif, 2019.

A. Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016.

L. Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2014.

A. Ahmadi and Narbuko, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

Z. Arifin, *Adopsi Teknologi untuk Keunggulan Daya Saing*. Jakarta: PT PLN (Persero), 2017.

S. Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

W. H. DeLone and E. R. McLean, "The DeLone and McLean model of information systems success: A ten-year update," *Journal of Management Information Systems*, 2003.

P. J. Denning and T. G. Lewis, "Technology adoption," *Communications of the ACM*, vol. 63, no. 6, pp. 27–29, 2020, doi:10.1145/3396265.

R. Djalil, *Akuntabilitas Keuangan Daerah Implementasi Pasca Reformasi*. Jakarta: PT Semesta Rakyat Merdeka, 2018.

E. M. Forman et al., "Promising technological innovations in cognitive training to treat eating-related behavior," *Appetite*, vol. 124, pp. 68–77, 2018, doi:10.1016/j.appet.2017.04.011.

G. Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

S. S. Indradi, *Dasar-Dasar dan Teori Administrasi Publik*. Malang: Agritek Yayasan Pembangunan Nasional, 2016.

R. E. Indrajit, *Electronic Government: Konsep Pelayanan Publik Berbasis Internet dan Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Andi, 2006.

"Jurnal Administrasi Publik Daerah," vol. 15, no. 2, pp. 134–145.

T. Y. Keban, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media, 2008.
L. Nofianti, *Public Sector Governance pada Pemerintah Daerah*. Pekanbaru, 2015.
Listyaningsih, *Administrasi Pembangunan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
L. Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Apollo, 2007.
J. F. Manengal, R. Gosal, and S. E. Pangemanan, "——," *Jurnal Governance*, vol. 6, no. 1, pp. 75–84, 2022.
Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi, 2018.
D. Mustafa, *Birokrasi Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta, 2019.
V. Ningsih, R. N. Sari, and M. Rasuli, "Analisis Penerapan E-Planning dan E-Budgeting pada Pemerintah Daerah," *Jurnal Ekonomi*, vol. 26, no. 2, pp. 18–30, 2018.
W. Nitisastro, *Pengalaman Pembangunan Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2014.
G. Nor, *Manajemen Publik pada Pemerintah*. Jakarta: Bumi Angkasa, 2014.
N. Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo, 2012.
A. P. Paputungan, L. Kalangi, and L. A. Mamonto, 2023.
H. Pasolong, *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta, 2018.
H. Prabayanti, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Adopsi Biopestisida Oleh Petani," Skripsi, Universitas Sebelas Maret, 2010.
Purwanto and Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
Reni, *Implementasi Sistem E-Planning pada Bappeda Kabupaten Kepulauan Meranti*, Skripsi, Universitas Islam Riau, 2021.\
B. Rianto and T. Lestari, *Polri & Aplikasi E-Government dalam Pelayanan Publik*. Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2012.
Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
Syafalevi, *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES, 2011.
I. K. Syafii, *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2016.
I. K. Syafiie, *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.